Pembangunan Pendidikan Karakter Bangsa

Khoirul Asiah

pkk.asiah@gmail.com

Abstrak

Hanya dalam kondisi damai bangsa Indonesia dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, politik dan budaya kuat. kondisi damai dapat terwujud apabila terbentuk karakter bangsa. Oleh karenanya pendidikan Karakter bangsa berperan penting dalam mewujudkan nilai-nilai untuk menginternalisasikan diri kedalam ruang kesadaran generasi anak bangsa. Sikap menghargai dan bekerjasama lahir melalui proses yang panjang yaitu hanya bisa dibangun melalui ruang-ruang konstruktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: *Perdamaian, Kebudayaan, Pendidikan Karakter Bangsa*

Pendahuluan

Indonesia dimaklumi sebagai negara yang plural penduduknya, baik dari sisi etnik, budaya, bahasa, juga agama. Pluralitas yang seperti ini merupakan modal awal dalam berbangsa mengingat, wilayah Indonesia yang meliputi Sabang dan Merauke, mewakili berbagai entitas keragaman tersebut. Kejayaan negara-negara di Nusantara pada masa lalu, semisal Sriwijaya, Majapahit, Kutai Kertanegara dan yang lain, merupakan perwujudan aktualisasi nilai-nilai adiluhung lokal yang plural, alias tidak didominasi oleh satu etnik dan budaya tertentu, melainkan percampuran positif antar berbagai budaya lokal yang ada.

Indonesia sebagai negara yang sudah berpengalaman mengelola keragaman semenjak tahun 1945 perlu belajar dari negara lain yang “gagal”. Meski harus pula diakui, bahwa Indonesia cukup berhasil dalam mempertahankan keragaman tersebut di tengah-tengah kegaduhan dan kekerasan yang mengatasnamakan SARA. Salah satu kegagalan yang perlu dipelajari adalah negara-negara Eropa.

Kegagalan beberapa negara di Eropa, Jerman salah satu contohnya, dalam mengelola keragaman diakibatkan oleh sikap arogan pemerintah tentang konsep kultur utama, *Leitkultur*. Jerman mewacanakan budaya Jerman sebagai “*imam*” kebudayaan, sementara kultur masyarakat pendatang sebagai “*makmum*”. Arogansi inilah yang kemudian memicu kegagalan program integrasi yang diterapkan dalam kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Kondisi seperti ini berbeda dengan Amerika Serikat yang sedari awal menyadari posisi wilayahnya sebagai tungku pelebur, *melting pot*, dari berbagai budaya masyarakatnya yang juga multi etnik. (Setiawan, 2011:)

Sebagai negara yang berpenduduk *multi etnik*, budaya bahkan agama, memang Indonesia tidak memiliki alasan untuk promulasikan konsep *Leitkultur* seperti yang dilakukan banyak kalangan di Jerman, karena konsep budaya Indonesia itu sendiri masih mengundang perdebatan. Oleh karenanya, penempatan budaya lokal serta kearifan lokal secara proporsional dari komunitas masyarakat di Indonesia menjadi sebuah pilihan. Perbedaan antar etnis, budaya serta agama semestinya tidak menjadi unsur yang meretakkan kebersamaan, sebaliknya keragaman menjadi kekayaan khazanah yang saling melengkapi.

Sejarah bangsa Indonesia, sejak tahun 1945. Telah mengalami pergantian pemerintahan sebanyak 7 kali. Berbagai gaya kepemimpinan, eksperimen politik, dan rekayasa sosial telah diupayakan. Akan tetapi sampai saat ini, bangsa Indonesia belum juga

mampu mencapai tingkat keadaban (*civility*) yang tinggi. Belum terbangun rasa kebanggaan dan rasa percaya diri nasional, karena belum ada kekuatan yang patut dibanggakan secara sosial, politik dan ekonomi. Reformasi yang berlangsung sejak 1998, juga tidak banyak membantu bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang kuat, mandiri dan disegani, bahkan hari ini kita mulai tertinggal dengan negara Malaysia.

Permusuhan, konflik, kekerasan dan semangat separatisme serta perang atas nama SARA masih saja menghantui bangsa Indonesia. Korupsi, nepotisme dan penyalahgunaan jabatan, pergaulan bebas, penggunaan NAFZA menjadi pemberitaan yang tiap detik mencul dimedia. Etika berbangsa juga mengalami kemerosotan, di mana kebohongan, kepalsuan, persengkokolan dan manipulasi kian menggejala.

Dalam kondisi anomali sosial, abnormalitas politik dan deviansi politik tersebut, kata 'perdamaian' menjadi kata yang penting, karena hanya dalam kondisi damai, bangsa ini dapat membangun kesejahteraan masyarakat, ekonomi, politik dan budaya yang kuat.

Di sisi lain, perdamaian sangat ditentukan oleh kondisi mental, ciri personalitas dan karakter bangsa. Karenanya, pendidikan karakter bangsa menjadi sangat urgen dalam rangka membangun perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dilandasi oleh prinsip kebersamaan, saling penghargaan dan kesatuan.

Pembahasan

Perdamaian pada tingkat nasional sangat ditentukan oleh kemampuan generasi bangsa untuk mengelola keanekaragaman menjadi sebuah kesatuan. Dalam hal ini, membangun bangsa (*nation*) dan rasa berbangsa (*nationalism*) memegang fungsi yang sakral. Rasa kebangsaan dalam bangsa yang multikultural menjadi kunci bagi rasa kesatuan sekaligus kebersamaan, kekeluargaan, tenggang rasa dan perdamaian. Sebaliknya, separatisme, konflik kebencian dan hasrat pemisahan diri adalah akibat dari ketidaksatuan, perbedaan dan eksklusivitas.

Pemahaman akan konsep bangsa dan kebangsaan menjadi fondasi dalam pemahaman karakter bangsa. Sebuah bangsa (*nation*) adalah kumpulan orang-orang di dalam satu wilayah, dengan mitos, ingatan sejarah, budaya publik, sistem ekonomi dan sistem hukum yang sama. Kesamaan-kesamaan ciri yang memungkinkan sebuah bangsa memiliki karakter bersama disebut '*karakter bangsa*'. Rasa kebangsaan atau nasionalisme adalah gerakan mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan dan identitas bersama.

Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang didalamnya terdapat sebuah kesadaran dan semangat untuk mencintai tanah air, mencintai bangsa Indonesia ini yang secara sederhana bagi orang muda perlu dirumuskan sehingga mudah bagi mereka untuk memahaminya. Secara ringkas nilai yang harus dipertahankan dan sikap yang harus dikembangkan adalah menjaga NKRI, membangun kerjasama dan persatuan dalam perbedaan, bangga dan gembira sebagai warga negara.

Karakter bangsa mengalami pasang surut seiring konstelasi dan perubahan sosial, politik dan kebudayaan. Kadang-kadang masalah karakter yang sama muncul berulang-ulang pada zaman yang berbeda. Pengulangan sejarah ini salah satunya adalah karena faktor 'mentalitas' (*mentality*). Sifat-sifat mentalitas buruk yang menurut Kuntjaraningrat, seperti meremehkan mutu, suka menerabas, tak percaya kepada diri sendiri, tak berdisiplin, mengabaikan tanggungjawab (Koentjaraningrat: 1974), tetap saja berulang hingga zaman

sekarang. Malah ditambah dengan mentalitas buruk lainnya, sebagai eksekris multidimensi.

Kebudayaan sebagai fondasi pembangunan karakter bangsa juga mengalami pasang surut dalam sejarah nasional. Di dalam berbagai rezim, peran kebudayaan dimarginalisasikan, diambil alih oleh kekuatan politik dan ekonomi sebagai ukuran pembangunan dan kemajuan bangsa. Kemajuan bangsa lantas diukur berdasarkan pencapaian-pencapaian materi, dengan mengabaikan pencapaian non materi (nilai, mental, pikiran, spiritualitas). Padahal, lebih dari enam dekade lalu Ki Mangunsarkoro sudah meletakkan sebuah fondasi tentang kebudayaan sebagai sebuah 'perjuangan untuk memperbaiki watak manusia' sebagai syarat kemajuan bangsa. Pendidikan ditujukan untuk membangun kebudayaan dan karakter bangsa, yaitu, 'berdasarkan keseimbangan antara watak dan pendidikan lahiriah'.

Pembangunan karakter bangsa dalam konstalasi masyarakat dan kebudayaan masa kini harus dilihat sebagai sebuah proses tanpa akhir, karena karakter bangsa bukanlah sesuatu yang telah selesai, tetap dan tak berubah. Karakter adalah sebuah proses menjadi (*becoming*) yang tanpa akhir dalam pasang surut perubahan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. membangun karakter bangsa artinya membangun sifat-sifat positif, konstruktif dan produktif dalam pengembangan kualitas manusia dan bangsa pada umumnya, bukan karakter-karakter yang menghalanginya.

Ada tiga sumber pembentukan karakter bangsa: tradisi, kekuatan dalam diri, dan kekuatan luar. Elemen pembentukan karakter dalam diri itu disebut juga *habitus*, yaitu struktur mental atau prinsip penggerak dalam diri anak bangsa, yang mampu menghasilkan seperangkat 'kecenderungan'. *Habitus* memastikan hadirnya pengalaman masa lalu, yang mengendap, yang menentukan kecenderungan, pilihan, persepsi, pikiran, nilai, penilaian dan tindakan (*action*). Akan tetapi, struktur mental mental itu harus diuji di dalam ranah, yaitu praktik-praktik sosial yang memungkinkan karakter individu, bangsa atau pemimpin mengalami perubahan (Piliang:2011).

Disini, harus ada pembedaan antara karakter yang hidup '*living character*' dan karakter yang dilembagakan oleh lembaga negara sehingga menjadi konsep formal karakter bangsa. Elemen-elemen masyarakat sesungguhnya mempunyai karakter yang kuat: daya juang tinggi, etos kerja tinggi, ketahanan terhadap krisis, kebutuhan prestasi tinggi sehingga mampu bertahan dalam kondisi sulit, seperti kemiskinan, krisis, kesenjangan dan kelangkaan sumber daya alam. Karakter inilah yang memungkinkan untuk dicapainya aneka prestasi generasi anak bangsa.

Sejarah membuktikan, bahwa keanekaragaman kebudayaan di Indonesia hidup secara berdampingan, saling mengisi, dan ataupun berjalan secara paralel. Misalnya kebudayaan keraton atau kerajaan yang berdiri sejalan secara paralel dengan kebudayaan berburu meramu kelompok masyarakat tertentu (Natuna: 2011). Dalam konteks kekinian dapat kita temui bagaimana kebudayaan masyarakat urban dapat berjalan paralel dengan kebudayaan rural atau pedesaan, bahkan dengan kebudayaan berburu meramu yang hidup jauh terpencil. Hubungan-hubungan antar kebudayaan tersebut dapat berjalan dan terjalin dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dimana bisa kita maknai bahwa konteks keanekaragamannya bukan hanya mengau kepada keanekaragaman kelompok suku bangsa semata, namun kepada konteks kebudayaan secara luas.

Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri atas berbagai budaya, karena adanya kegiatan dan pranata khusus. Perbedaan ini justru berfungsi mempertahankan dasar identitas diri dan integrasi sosial masyarakat tersebut. Pluralisme masyarakat, dalam tatanan sosial, agama dan suku bangsa, telah ada sejak nenek moyang, kebhinekaan budaya yang dapat hidup berdampingan, merupakan kekayaan dalam khazanah budaya nasional, bila identitas budaya dapat terjembatani dengan membangun kehidupan multikultural yang sehat, dilakukan dengan meningkatkan toleransi dan apresiasi antar budaya, dan dapat diawali dengan pengenalan ciri khas budaya tertentu, terutama pemahaman pola perilaku masyarakatnya.

Hanya saja, karakter masyarakat yang kuat (*strong society*) bersifat parsial, sektoral, lokal, sehingga tidak mampu menjadi karakter bangsa. Karena *living character* ini tidak dikelola secara sistematis, rasional dan berkelanjutan oleh negara, sehingga tak mampu menjadi *institutional character*. Disinilah perlunya kembali menemukan karakter bangsa yang berpacu pada nilai-nilai positif yang ada ditengah masyarakat. Perlu ada langkah-langkah strategis di dalam pembangunan karakter bangsa yaitu:

- a. Sosialisasi: penyadaran semua pemangku kepentingan akan pentingnya karakter bangsa. Media massa perlu berperan serta dalam sosialisasi.
- b. Pendidikan: Formal (satdik), nonformal (kegiatan keagamaan, kursus, pramuka, dll). Informal (keluarga, masyarakat dan tempat kerja), forum pertemuan (kepemudaan).
- c. Pemberdayaan: perilaku berkarakter dibina dan dikuatkan dengan penanaman nilai kehidupan agar menjadi budaya.
- d. Kerjasama: membangun kerjasama sinergis antara semua pemangku kepentingan.

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini,

- a. Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, khidupan individu, masyarakat dan bangsa selalu didasari oleh ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari oleh nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang bersala dari agama.
- b. Pancasila: negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai tergantung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.
- c. Budaya: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting

dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.

- d. Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia.

Pendidikan Karakter Bangsa Dari Knowing Menuju Doing

Pendidikan karakter harus bergerak dari *knowing* menuju *doing* atau *acting*. Kilpatrick menyebutkan salah satu penyebab ketidakmampuan seseorang berlaku baik meskipun ia telah memiliki pengetahuan tentang kebaikan itu (*moral knowing*) adalah karena ia tidak terlatih untuk melakukan kebaikan (*moral doing*). Berangkat dari pemikiran ini maka kesuksesan pendidikan karakter sangat tergantung pada ada tidaknya *knowing*, *loving*, dan *doing* atau *acting* dalam penyelenggaraan pendidikan karakter.

Moral knowing sebagai aspek pertama memiliki enam unsur, yaitu kesadaran moral (*moral awareness*), pengetahuan tentang nilai-nilai moral (*knowing moral values*), penentuan sudut pandang (*perspective taking*), logika moral (*moral reasoning*), keberanian mengambil menentukan sikap (*decision making*), dan pengenalan diri (*self knowledge*). Keenam unsur ini adalah komponen-komponen yang harus diajarkan kepada generasi penerus bangsa untuk mengisi ranah kognitif mereka.

Selanjutnya *moral loving* atau *moral feeling* merupakan penguatan aspek emosi untuk menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh siswa, yaitu kesadaran jati diri, percaya diri (*self esteem*), kepekaan terhadap derita orang lain (*empathy*), cinta kebenaran (*loving the good*), pengendalian diri (*self control*), kerendahan hati (*humility*). Setelah dua aspek tadi terwujud, maka *moral acting* sebagai *outcome* akan dengan mudah akan tumbuh (Direktorat Pembinaan Dikmas:2012)

Pendidikan sebagai proses humanisasi menekankan pembentukan makhluk sosial yang mempunyai otonomi moral dan sensitivitas/kedaulatan budaya, yaitu manusia yang bisa mengelola konflik, menghargai kemajemukan dan permasalahan silang budaya.

Penutup

Konflik, isu SARA, korupsi yang meluas, kekerasan yang menjamur dan hedonisme yang tidak terbandung, gaya hidup yang tidak terbatas semua menjadi penghambat pembangunan manusia dan karakter bangsa.

Pendidikan karakter bangsa selain mengembangkan dan memperkuat potensi pribadi juga menyaring pengaruh dari luar yang akhirnya dapat membentuk karakter peserta didik yang dapat mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Nasionalisme Indonesia dalam pengertian modern dan post modern memerlukan landasan yang kuat dan visi yang jelas. Landasannya adalah budaya yang bhineka dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Dari kebhinnekaan budaya tersebut telah berakar (*rooted*) dalam nilai-nilai Pancasila yang kemudian dikonstruksikan sebagai kesatuan nilai-nilai pancasila dalam UUD 1945 yang merupakan milik dari seluruh warga negara Indonesia. Milik itu akan terpancar dari keseluruhan tingkah laku serta pola kehidupan (*way of life*) dari setiap warga negara Indonesia. Inilah yang dimaksud dengan karakter bangsa Indonesia.

Sebagai kesimpulan, karakter atau watak bangsa Indonesia dapat didefinisikan sebagai berikut: karakter atau watak bangsa Indonesia adalah suatu konstruksi budaya tentang sikap hidup (cara berpikir dan bertindak) dari setiap individu bangsa Indonesia yang multikultural yang terpancar dari nilai-nilai budaya/ideologi nasional Indonesia, Pancasila, dalam menghadapi perubahan global.

Daftar Pustaka

- Mas'ud, Abdurrahman (ed). *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI Sekretariat Jenderal Pusat Kerukunan Umat Beragama, 2011
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1974
- Natuna, Daeng Ayub. *Kearifan Budaya dan Etnosentrisme Dalam Kehidupan masyarakat Majemuk*, dalam Jurnal Kerukunan Lintas Agama. Membentuk dan Mengembangkan Karakter Bangsa, Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, Vol.7-November 2011
- Pola Asuh Penentu Karakter Anak*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Informal Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, 2012.
- Prosiding Memantapkan Etika Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian RI, 2011.
- Piliang, Yasraf Amir, Jurnal Akrab “ *Keaksaraan Untuk Perdamaian*” Vol. II Edisi 3 Desember 2011